

Ringkasan Umum

Memasuki tahun 2017, perkembangan berbagai indikator perekonomian DKI Jakarta semakin memperkuat indikasi perbaikan ekonomi ibukota. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin solid dan bahkan pada triwulan I 2017 dapat tumbuh sangat tinggi akibat adanya dampak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan gencarnya pembangunan konstruksi proyek infrastruktur pemerintah. Perkembangan ekonomi yang juga diiringi dengan terkendalinya inflasi di ibukota diharapkan dapat terus mendukung berlanjutnya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

Untuk turut mendukung momentum pemulihan ekonomi tersebut secara nasional, dan dengan tetap mengutamakan kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate, yang pada medio akhir tahun lalu telah dilakukan pelonggaran dengan menurunkan suku bunga sebanyak dua kali. Kebijakan ini diharapkan akan semakin memperkuat penerapan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai hal ini diharapkan dapat semakin mendorong optimisme masyarakat sehingga perekonomian nasional, khususnya DKI Jakarta, dapat terus menguat dan semakin berkualitas.

Setelah sempat melambat pada triwulan IV 2016 dengan realisasi 5,51% (yoy), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kembali menguat pada triwulan I 2017 menjadi 6,48% (yoy). Menguatnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari pengaruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mendorong pertumbuhan konsumsi, khususnya Konsumsi Lembaga Publik yang melayani Rumah Tangga (LNPR). Pelaksanaan Pilkada juga mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan awal tahun yang cukup baik meskipun bersifat terbatas, mengingat tren pertumbuhan konsumsi rumah tangga awal tahun yang secara umum mengalami perlambatan dibandingkan periode triwulan akhir tahun sebelumnya. Di samping itu, dorongan yang cukup kuat juga dikontribusi oleh komponen investasi, khususnya investasi bangunan melalui akselerasi berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi di Jakarta. Terus membaiknya harga komoditas dunia turut meningkatkan daerah penghasil sumber daya alam dan juga turut menopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, dengan perdagangan antardaerah neto yang tumbuh cukup baik.

Tekanan inflasi di ibukota pada awal tahun 2017 masih terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan capaian inflasi pada triwulan I 2017 sebesar 3,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi rata-rata lima tahun sebelumnya di kisaran 5,7% (yoy). Terjaganya inflasi di DKI Jakarta dipengaruhi oleh harga pangan yang secara umum tetap terkendali, sejalan dengan terjaganya kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah menyesuaikan subsidi listrik 900 VA secara bertahap per Januari 2017 dan menaikkan tarif STNK, tidak serta merta meningkatkan tekanan inflasi ibukota secara berlebihan.

Dari sisi kesejahteraan, pembangunan di Jakarta secara umum berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduknya. Hal tersebut terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 sebesar 79,6 atau setara dengan status "Tinggi". Capaian IPM tersebut bahkan mendekati status "Sangat Tinggi" dengan indeks 80,0. Perbaikan IPM terutama didorong oleh dimensi standar hidup layak, yang tercermin dari membaiknya pengeluaran per kapita masyarakat. Di samping itu,

kemampuan belanja masyarakat membaik, yang didukung oleh meningkatnya pendapatan yang diperoleh kelompok masyarakat kelas menengah. Lebih lanjut, membaiknya kesejahteraan masyarakat Jakarta yang didorong perkembangan ekonomi ibukota juga ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih dalam tren menurun.

Mengiringi perkembangan perekonomian Jakarta tersebut, kondisi stabilitas sistem keuangan ibukota pada triwulan I 2017 masih terjaga, yang didukung oleh kinerja yang baik pada sektor perbankan. Kinerja sektor korporasi dan sektor rumah tangga juga relatif cukup baik. Kinerja korporasi menunjukkan peningkatan yang didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor utama Jakarta, dan terindikasi dari membaiknya indikator rasio keuangan utama. Di sisi lain, resiliensi sektor rumah tangga juga masih relatif cukup baik yang tercermin melalui membaiknya tingkat ekspektasi dan keyakinan rumah tangga terhadap kondisi perekonomian. Perbaikan kondisi rumah tangga tersebut juga tercermin melalui peningkatan permintaan kredit dan turunnya rasio NPL.

Pada sisi sistem pembayaran, aktivitas transaksi keuangan masyarakat secara tunai maupun nontunai mengalami sedikit perlambatan, sehingga menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga bersifat terbatas. Dari sisi transaksi tunai, perlambatan terlihat dari net outflow aliran uang tunai yang lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu. Sedangkan dari sisi nontunai juga terlihat dari perlambatan transaksi yang menggunakan sistem kliring nasional (SKN-BI).

Ke depan, berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, dan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi triwulan sebelumnya. Faktor pendorong pertumbuhan masih akan bersumber dari konsumsi masyarakat, seiring dengan membaiknya investasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Perdagangan antardaerah neto yang juga meningkat akan turut memberikan kontribusi positif, di tengah kinerja ekspor yang masih lemah.

Mengamati perkembangan terkini di sisi harga, tekanan inflasi pada tahun 2017 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya tekanan inflasi adalah dampak dari kebijakan penyesuaian subsidi listrik untuk golongan 900 VA yang tidak setinggi perkiraan semula, karena jumlah kelompok pelanggan tersebut yang tidak terlalu banyak di Jakarta. Kendati demikian, berbagai langkah akan terus ditempuh agar perkembangan inflasi Jakarta dapat tetap mengawal tercapainya sasaran inflasi nasional tahun 2017 sebesar $4\% \pm 1\%$. Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI dalam menentukan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi akan terus ditingkatkan, antara lain melalui pengendalian harga pangan di Ibukota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan